

BAB V

PENUTUP

5.1.Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat ditarik adalah inventarisasi aset tetap yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Banyumas sudah baik namun belum optimal. Inventarisasi aset tetap masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Inventarisasi fisik aset mencerminkan adanya upaya yang baik dalam pencatatan Kartu Identitas Barang (KIB), didukung oleh penggunaan aplikasi seperti SAKTI dan SIMAN yang berhasil meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan aset. Namun, kekurangan data pada KIB mengindikasikan adanya celah dalam koordinasi dan verifikasi prosedur. Selain itu, pencatatan pada Daftar Barang Ruangan (DBR) juga menunjukkan ketidaksesuaian dengan kondisi aktual aset, yang sebagian besar disebabkan oleh peminjaman barang antar-ruangan yang tidak tercatat dengan baik.

Kurangnya kepatuhan pegawai dalam melaporkan perpindahan Barang Milik Negara (BMN) serta rendahnya disiplin dalam memperbarui DBR menjadi kendala yang memengaruhi keakuratan data. Faktor-faktor seperti beban kerja yang tinggi, kesadaran pegawai yang rendah, dan minimnya pengawasan rutin menghambat efektivitas pengelolaan aset,

meskipun teknologi seperti SIMAN telah memberikan kemudahan dalam proses pencatatan.

Dari sisi inventarisasi yuridis, BPS Kabupaten Banyumas telah menunjukkan kinerja yang baik dalam mengidentifikasi status kepemilikan aset tetap melalui kelengkapan dokumen legal seperti sertifikat tanah, IMB, dan SK PSP. Proses Penetapan Status Penggunaan (PSP) juga telah dilakukan sesuai dengan regulasi yang berlaku, didukung oleh aplikasi SIMAN yang mempercepat proses administrasi dan meminimalkan kesalahan. Kendala akibat transisi prosedur PSP berhasil diatasi dengan pelatihan dan penyesuaian sistem, sehingga memastikan pengelolaan aset yang lebih efektif.

5.2.Implikasi

Berdasarkan kesimpulan penelitian mengenai manajemen aset sektor publik di BPS Kabupaten Banyumas studi tentang inventarisasi aset tetap, terdapat beberapa implikasi penting yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan langkah perbaikan di masa depan.

Implikasi yang dapat dilakukan adalah:

1. Peningkatan Koordinasi dan Verifikasi Prosedur

Kekurangan data pada KIB dan ketidaksesuaian pada DBR mengindikasikan kebutuhan untuk memperkuat koordinasi antar-unit serta memastikan verifikasi prosedur yang lebih menyeluruh. Hal ini dapat diimplementasikan melalui penyusunan mekanisme koordinasi

yang lebih terstruktur, seperti pembentukan tim khusus untuk verifikasi aset secara periodik.

2. Penguatan Budaya Akuntabilitas dan Kepatuhan

Rendahnya kepatuhan pegawai dalam melaporkan perpindahan aset menunjukkan perlunya program sosialisasi yang intensif untuk meningkatkan kesadaran pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan BMN. Pengembangan kebijakan internal yang menekankan sanksi dan insentif juga dapat mendorong kepatuhan pegawai.

3. Penambahan Sumber Daya Manusia dan Pengawasan Rutin

Terbatasnya jumlah pengelola BMN dan minimnya pengawasan rutin menjadi kendala yang memengaruhi efektivitas pengelolaan aset. Penambahan sumber daya manusia khusus untuk pengelolaan aset dan pelaksanaan pengawasan secara berkala dapat membantu memastikan akurasi dan keandalan data inventarisasi. Kekurangan tenaga ahli yang dimiliki oleh BPS Kabupaten Banyumas harus dibuatkan analisis beban kerja yang sesuai agar dapat dikoordinasikan dengan BPS Republik Indonesia untuk mendapatkan alokasi yang sesuai. Apabila tenaga ahli tersebut membutuhkan waktu yang sangat lama dan tidak harus Aparatur Sipil Negara, BPS Kabupaten Banyumas dapat membuka lowongan kerja melalui sistem PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu).